

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020

Oleh :
Arif Alfajar¹⁾, Ali Masjono²⁾

¹⁾Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Email: arif.alfajar.ak18@mhs.pnj.ac.id

²⁾Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta, Email: ali.masjonomuchtar@akuntansi.pnj.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the performance of the Bogor district Government for period of 2015-2020 which is measured using the level of fiscal decentralization, dependence, independence, effectiveness, efficiency, spending activities, and local revenue, then the perception and experience of the performance measurement results. The results of the study show that the performance of the Bogor Regency Government in 2015-2020 using the ratio of the degree of decentralization of the fiscal government is in the sufficient category. The ratio obtains the High category. The regional financial independence ratio is in the participatory category. The effective ratio obtains the very effective category. Efficiency ratio is judged to obtain inefficient category. The compatibility ratio is seen from the average expenditure of the two, operating expenditure is superior to capital expenditure. The growth ratio shows a positive trend, which is 10.21%.

Keywords: Regional Financial Performance; Interpretation; measurement results.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015-2020 yang diukur menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, ketergantungan, kemandirian, efektivitas, efisiensi, aktivitas belanja, serta pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, kemudian diinterpretasikan serta implikasi hasil pengukuran kinerja tersebut. Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 dengan menggunakan Rasio derajat desentralisasi fiskal pemerintah masuk kedalam kategori cukup. Rasio ketergantungan memperoleh kategori Tinggi. Rasio kemandirian keuangan daerah memperoleh kategori partisipatif. Rasio efektivitas memperoleh kategori sangat efektif. Rasio efisiensi jika dinilai memperoleh kategori tidak efisien. Rasio keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul bila dibandingkan belanja modal. Rasio Pertumbuhan menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 10,21%.

Kata Kunci : Kinerja Keuangan Daerah; Interpretasi; implikasi hasil pengukuran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal didanai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan cerminan dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan selalu menjadi acuan dalam menyelenggarakan roda pemerintahan secara efektif, dan efisien, mampu mendorong peran masyarakat dalam pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan potensi yang dimiliki. Dalam upaya meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus lebih menggali potensi daerahnya, dan meningkatkan sumber keuangannya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terpenting dalam mengerahkan dana penyelenggaraan daerah, oleh karena itu seringkali PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah, demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki keleluasaan wewenang dalam menjalankan roda pemerintahannya, namun disisi lain pemerintah daerah tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab untuk lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintah pusat maupun masyarakat di daerah otonom tersebut.

Rumusan Masalah

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 6 Tahun (2015-2020) bisa dikatakan belum mengefisienkan pendapatan yang dimiliki, hal itu disebabkan kenderungan lebih besar dalam membiayai kegiatan pemerintahan daerah sehingga seringkali terjadi defisit yang mengakibatkan daerah belum mampu dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah agar dapat mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020 dengan menggunakan rasio rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, berasal dari APBD. Di bidang penyelenggaraan keuangan daerah, kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya berupa Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan kepada para pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kekuasaan baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Rasio Keuangan

Menurut Halim (2007) kinerja keuangan daerah merupakan penilaian terhadap kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam menghadapi otonomi daerah sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi 5 tujuan yaitu menilai kemandirian keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, mengukur efektifitas dan efisiensi keuangan, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan dan pengeluaran pembiayaan lainnya, mengukur peran masing-masing sumber pendapatan dalam penyusunan pendapatan daerah, serta melihat pertumbuhan perolehan pendapatan selama periode tertentu. Menurut Brown (1993), dalam hal mengukur kinerja keuangan maka perlu menggunakan analisa rasio keuangan pemerintah. Terdapat beberapa analisis rasio didalam pengukuran kinerja keuangan daerah yang dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Menurut Haryanto (2014), Rasio derajat desentralisasi fiskal merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada

pemerintah daerah untuk menggali dan mengelola pendapatan. Rasio ini dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Semakin tinggi kontribusi PAD, maka semakin tinggi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Rasio DDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio derajat desentralisasi fiskal sebagai berikut:

Tabel 1. Kategori Derajat Desentralisasi Fiskal

Ketergantungan Daerah	Kemampuan Keuangan
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,01	Sangat Baik

(Sumber: Munir dkk, 2004)

Rasio Ketergantungan Daerah

Menurut Susilawati (2018) menyatakan bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Menurut Mahmudi (2016) berikut merupakan rumus untuk menghitung Rasio Ketergantungan :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio ketergantungan daerah sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Ketergantungan Daerah

Ketergantungan Daerah	Kemampuan Keuangan
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,01	Sangat Tinggi

(Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio Kemandirian dihitung dengan cara perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio kemandirian daerah sebagai berikut:

Tabel 3. Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian dan Kemampuann Daerah

Rasio Kemandirian	Kemampuan Keuangan	Pola Hubungan
0-25%	Sangat Kurang	Instruktif
25-50%	Kurang	Konsultif
50-75%	Sedang	Partisipatif
75-100%	Cukup	Delegatif

Sumber: Halim (2007)

Keterangan :

- Pola hubungan instruktif, artinya kemandirian pemerintah daerah masih sangat kecil karena masih terlalu bergantung pada pemerintah pusat, atau bisa dikatakan belum mampu melaksanakan otonomi daerah.
- Pola hubungan konsultif, artinya daerah sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah, karena campur tangan pemerintah pusat sudah berkurang walau belum terlalu besar.
- Pola hubungan partisipatif, berarti peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, terlihat bahwa daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah karena tingkat kemandirian sudah cukup tinggi.
- Pola hubungan delegatif, artinya daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah tanpa bantuan campur tangan dari pemerintah pusat.

Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Menurut Mahmudi (2016) rasio ini diukur melalui Perbandingan :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efektivitas sebagai berikut:

Tabel 4. Kategori Penilaian Efektivitas Pendapatan Daerah

Rasio Efektivitas	Keterangan
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup Efektif
75 – 89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2016)

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Menurut Mahmudi (2016) rasio ini dapat diukur melalui perbandingan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Belanja Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Selanjutnya dilihat tolak ukur kinerja keuangan daerah berdasarkan rasio efisiensi sebagai berikut:

Tabel 5. Kategori Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan

Rasio Efisiensi	Keterangan
> 100%	Tidak Efisiensi
90,00 – 100,00%	Kurang Efisiensi
80,00 – 90,00%	Cukup Efisiensi
60,00 – 80,00%	Efisiensi
<60%	Sangat Efisiensi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fispol UGM (1991)

Rasio Keresasian Belanja

Menurut Mahmudi (2010) analisis proporsi keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Agar fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisasi dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja dengan melakukan Analisis Keserasian Belanja, antara lain :

$$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Belanja operasi adalah belanja yang terkait langsung dengan kegiatan (aktivitas) sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran belanja yang tidak terkait dengan pelaksanaan kegiatan secara langsung. Semestinya belanja operasi dari belanja modal, sebab belanja modal sangat memengaruhi output kegiatan.

Rasio Pertumbuhan PAD

Menurut Halim (2008) rasio pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.

Pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dihitung dengan menggunakan formula :

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_t - (t - 1)}{\text{PAD}_t - 1} \times 100$$

Apabila kecendrungan (tren) pendapatan meningkat maka pertumbuhan pendapatan dikatakan positif, begitu pula sebaliknya, jika pendapatan mengalami penurunan maka menunjukkan pertumbuhan pendapatan dikatakan negatif (Mahmudi, 2016).

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Adapun tujuan penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kuantitatif ini adalah untuk menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi kepustakaan sehingga lebih memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu kesimpulan. Dimana penelitian diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan rasio-rasio keuangan kemudian dipaparkan secara tertulis oleh penulis.

Data kuantitatif dalam penelitian ini ditelusuri dari menghitung rasio keuangan yang diambil berdasarkan laporan realisasi anggaran (LRA) Kabupaten Bogor tahun 2015-2020. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung dengan studi kepustakaan. Data sekunder yang dimaksud adalah APBD dalam laporan realisasi anggaran yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan kabupaten bogor dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan dan pencapaian atas pelaksanaan program/kegiatan yang dilakukan dalam bidang keuangan untuk kurun waktu 2015-2020. Adapun hasil dari pengukuran rasio tersebut adalah :

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 6. Hasil Pengukuran Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Rasio	Kemampuan Keuangan
2015	33,19%	Cukup
2016	38,37%	Cukup
2017	43,61%	Baik
2018	38,28%	Cukup
2019	38,85%	Cukup
2020	36,55%	Cukup
Mean	38,14%	Cukup

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Berdasarkan hasil perhitungan rasio tersebut, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dapat dikatakan cukup dalam membiayai pembangunan daerah Kabupaten Bogor. Hal ini terjadi karena PAD masih relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Selain itu partisipasi kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah masih sangat kurang sehingga menyebabkan PAD tidak memiliki andil yang besar dalam membiayai pembangunan daerah di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan kategori baik ditahun 2017, sementara kembali mengalami penurunan peran dari pendapatan asli daerah mengalami penurunan dalam total pendapatan daerah. Oleh karena itu kedepannya Pemerintah Kabupaten Bogor diharapkan untuk berupaya meningkatkan PAD dengan mengembangkan potensi-potensi yang sudah ada maupun menggali potensi-potensi yang baru.

2. Rasio Ketergantungan Daerah

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 7. Hasil Pengukuran Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Rasio	Kemampuan Keuangan
2015	42,82%	Tinggi
2016	45,07%	Tinggi
2017	39,32%	Cukup
2018	38,61%	Cukup
2019	38,03%	Cukup
2020	36,76%	Cukup
Mean	40,10%	Tinggi

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Berdasarkan hasil pengukuran secara keseluruhan memperoleh presentase sebesar 40,10%, maka dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tinggi. Namun hal ini disebabkan karena tingginya ketergantungan terhadap dana perimbangan pada tahun 2015-2016. Sedangkan tahun berikutnya sudah memperoleh kategori cukup. Pemerintah Kabupaten Bogor seharusnya lebih kreatif dan inovatif dalam menggali sumber potensi yang dimiliki daerahnya. Maka, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD baik melalui pola instesifikasi yaitu melalui peningkatan pendapatan yang dilakukan dengan lebih menekankan pada penerapan nilai atau prinsip-prinsip perpajakan yang baik dengan cara mengoptimalkan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi yang sudah ada. Serta melalui pola eksensifikasi peningkatan PAD dengan lebih menekankan pada perluasan sumber-sumber pendapatan baru melalui pengembangan potensi daerah sehingga akan memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal tersebut memungkinkan akan berkurangnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 8. Hasil Pengukuran Rasio Kemandirian

Tahun	Rasio	Kemampuan Keuangan
2015	51,90%	Konsultif
2016	63,75%	Partisipatif
2017	80,43%	Delegatif
2018	70,83%	Partisipatif
2019	72,14%	Partisipatif
2020	68,10%	Partisipatif
Mean	67,86%	Partisipatif

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, jika dinilai secara keseluruhan memperoleh presentase sebesar 67,86% maka dapat dikatakan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori partisipatif atau sudah bisa dikatakan peran pemerintah pusat sudah mulai berkurang, terlihat bahwa daerah yang bersangkutan mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah karena tingkat kemandirian sudah cukup tinggi. Pemerintah Kabupaten Bogor sudah hampir bisa dikatakan memiliki kemampuan dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Bogor tetap harus mengoptimalkan PAD sehingga memperoleh kategori delegatif. Yang artinya pemerintah kabuapten bogor harus menjadikan PAD sebagai alat utama dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Pemerintah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sendiri sehingga tidak lagi bergantung baik kepada pemerintah pusat maupun provinsi dan daerah lainnya. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi setiap pemerintahan daerah agar selaras dengan asas desentralisasi yang menuntut setiap daerah mampu dan mandiri dalam melaksanakan kekuasaan dan tanggung jawabnya sendiri.

4. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas dihitung dengan cara perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah dianggarkan. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 9. Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas

Tahun	Rasio	Kemampuan Keuangan
2015	103,75%	Sangat efektif
2016	102,69%	Sangat efektif
2017	102,13%	Sangat efektif
2018	103,59%	Sangat efektif
2019	106,24%	Sangat efektif
2020	98,60%	Cukup efektif
Mean	102,83%	Sangat efektif

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Rasio Efektivitas jika dinilai secara keseluruhan dalam kurun waktu 2015-2020 maka dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori sangat efektif, karena memperoleh presentase rasio sebesar 102,83% artinya pemerintah Kabupaten Bogor mampu memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai rencana yang ditargetkan. Namun terjadi penurunan pada total pendapatan yang diterima selama tahun 2020 bila dibandingkan tahun sebelumnya merupakan dampak dari pandemi covid 19 dikarenakan sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat perekonomian masyarakat terganggu, yang mana membuat masyarakat tidak dapat menjalankan kegiatan ekonomi dengan semestinya sehingga membuat pendapatan yang diperoleh masyarakat mengalami penurunan dimana hasilnya masyarakat mengalami ketidakmampuan dalam membayar pajak. Pemerintah daerah harus mencari alternatif-alternatif yang memungkinkan untuk meningkatkan realisasi, dan memerlukan kreatifitas dari aparat pelaksanaan keuangan daerah untuk mencari sumber baru

baik melalui program Kerjasama dengan pihak swasta dan juga program peningkatan PAD, misalnya pendirian BUMD sektor potensial.

5. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Berikut merupakan hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Bogor tahun 2015-2020 :

Tabel 10. Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio	Kemampuan Keuangan
2015	93,46%	Kurang Efisien
2016	108,24%	Tidak Efisien
2017	98,58%	Kurang Efisien
2018	100,06%	Tidak Efisien
2019	95,49%	Kurang Efisien
2020	109,34	Tidak Efisien
Mean	100,86%	Tidak Efisien

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Rasio Efisiensi jika dinilai secara memperoleh presentase sebesar 100,86%, maka dapat dikatakan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor memperoleh kategori tidak efisien, Rasio efisiensi, Pemerintah Kabupaten Bogor masih sangat buruk dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Perlu adanya strategi untuk menghitung secara cermat biaya yang baik serta membenahan dalam meminimalisir penggunaan anggaran belanja. Pemerintah Kabupaten Bogor masih sangat buruk dalam menekan jumlah belanja daerahnya. Hal ini dikarenakan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memperoleh pendapatannya masih cukup besar. Seharusnya pemerintah daerah dapat meminimalisir jumlah belanjanya dengan disesuaikan pendapatannya. Perlu adanya strategi yang baik serta membenahan yang harus selalu dilakukan dalam mengelola pendapatan yang dimiliki dan memungkinkan adanya meminimalisir belanja yang akan dilakukan sehingga akan menimbulkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Untuk itu pemerintah Kabupaten Bogor perlu menghitung secara cermat besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya.

6. Rasio Keserasian Belanja

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio keserasian belanja Kabupaten Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 11. Hasil Pengukuran Rasio Belanja Rutin dan Modal

Tahun	Rasio Belanja Rutin	Rasio Belanja Modal
2015	63,22%	25,89%
2016	62,45%	23,85%
2017	63,51%	22,18%
2018	69,52%	17,99%
2019	66,59%	20,17%
2020	65,12%	17,71%
Mean	65,07%	21,30%

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Rasio Keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul dengan 65,07% sedangkan belanja modal hanya sebesar 21,20%. Artinya pemerintah Kabupaten Bogor tidak Fokus dalam penyediaan sarana dan prasarana bagi masyarakatnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bogor cenderung tidak fokus dalam penyediaan sarana dan prasarana dikarenakan masih besarnya pengeluaran rutin guna memenuhi aktivitasnya pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi sebagai pelayan masyarakat, pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada permasalahan dalam pengambilan keputusan belanja modal publik. Pengeluaran untuk belanja modal publik harus mendapat perhatian yang lebih besar bila dibandingkan dengan pengeluaran rutin. Hal tersebut dikarenakan pengeluaran modal memiliki efek jangka panjang, bila dibandingkan

belanja rutin yang lebih berdampak jangka pendek. Pada dasarnya dana anggaran daerah merupakan dana publik/masyarakat yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sehingga penyediaan sarana dan prasarana merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Bogor supaya dapat menikmati secara langsung oleh publik/masyarakat. Hal tersebut akan selaras untuk mewujudkan misi Kabupaten Bogor yaitu meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas daerah yang berkualitas dan terintegrasi secara berkelanjutan

7. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Berikut merupakan hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bogor tahun 2015-2020:

Tabel 13. Hasil Pengukuran Rasio Pertumbuhan PAD

Tahun	Pertumbuhan	Rasio
2015	335.979.819.836	20,16%
2016	289.965.855.539	14,48%
2017	749.696.773.104	32,71%
2018	- 247.211.707.753	-8,13%
2019	366.505.175.346	13,11%
2020	- 351.010.563.216	-11,10%
	Mean	10,21%

Sumber : BPKAD Kabupaten Bogor (data diolah).

Rasio Pertumbuhan jika dilihat presentase rata-rata kurun waktu 2015-2020 menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 10,21%. Pada rasio pertumbuhan Kabupaten Bogor masih mengalami naik turun serta terdapatnya trend negatif dan yang artinya terjadi ketidakstabilan dalam upaya peningkatan laju pertumbuhan pendapatan asli daerah yang seharusnya diperbaiki. Sangat diperlukan perumusan strategi yang baik serta evaluasi pada periode sebelumnya, sehingga dapat mengetahui potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian. Pemerintah daerah harus berkomitmen dalam meningkatkan pendapatan daerahnya, dengan cara pengelolaan yang baik pendapatan daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah serta membangun jaringan kerjasama dengan berbagai instansi dan Lembaga terkait. Selain itu, pemerintah harus meningkatkan mutu kualitas SDM pengelola PAD,serta perbaikan system informasi dan pendokumentasian data wajib pajak daerah..

Implikasi Hasil Pengukuran

Implikasi hasil pengukuran dalam meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor:

- Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dikarenakan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan. Hal itu yang membuat Kabupaten Bogor memperoleh kategori yang belum memuaskan pada rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan, rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan PAD yaitu dikarenakan masih terhitung kecilnya PAD bila dibandingkan dengan pendapatan transfer yang berasal dari pusat maupun provinsi. maka dari itu PAD dijadikan sebagai alat utama dalam mengantisipasi apabila terjadi penurunan terhadap dana alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui dana perimbangan. Hal ini berarti Pemerintah Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan utamanya yaitu melalui pajak daerah. Peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui yaitu melalui intensifikasi serta ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
- Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan refofussing belanja daerah, Berdasarkan Pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan, Kabupaten Bogor memperoleh kategori yang belum memuaskan pada Rasio efisiensi serta keserasian belanja yaitu

dikarenakan masih tidak efisien dalam belanja daerahnya, serta pemerintah Kabupaten Bogor terlalu fokus dalam membiayai belanja rutinnya Pemerintah Kabupaten Bogor harus dapat menekan jumlah belanja daerahnya. Dengan melakukan evaluasi dari hasil anggaran ditahun tahun sebelumnya sehingga dapat membuat strategi yang baik, cermat dan matang dalam merencanakan anggaran dan belanjanya sehingga akan meminimalisir dalam penggunaan anggarannya. Dalam hal ini pemerintah perlu mengurangi porsi anggaran belanja rutinnya dikarenakan belanja rutin selalu mengalami kenaikan bila dibandingkan belanja modal. Pemangkasan perlu dilakukan untuk menghemat biaya sehingga pengeluaran-pengeluaran tersebut bisa difokuskan dan diprioritaskan untuk penanggulangan covid-19

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020 pada rasio derajat desentralisasi fiskal masuk kedalam kategori Cukup dan memperoleh presentase sebesar 38,14%. Rasio ketergantungan memperoleh presentase sebesar 40,10%, maka dapat dikatakan memperoleh kategori Tinggi pada rasio ketergantungan. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah memperoleh presentase sebesar 67,86% dan memperoleh kategori partisipatif. Rasio Efektivitas dapat dikatakan kinerja keuangan memperoleh kategori sangat efektif, karena memperoleh presentase rasio sebesar 102,83%. Rasio Efisiensi jika dinilai secara memperoleh presentase sebesar 100,86%, maka memperoleh kategori tidak efisien. Rasio Keserasian dilihat dari rata-rata belanja keduanya, belanja operasi lebih unggul dengan 65,07% sedangkan belanja modal hanya sebesar 21,20%. Rasio Pertumbuhan jika dilihat menunjukkan trend yang positif yaitu sebesar 10,21%.
- b) Implikasi kinerja ini adalah Pemerintah Kabupaten Bogor perlu mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dan perlu melakukan refofussing belanja daerah dikarenakan berdasarkan pengukuran kinerja keuangan yang telah dilakukan belum memuaskan.

Saran

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bogor diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) utamanya pada era pandemi covid-19 maupun pasca pandemi covid-19 dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang menjadi potensi utama melalui pajak daerah dan retribusi daerah sebagai kekuatan utama untuk menambah PAD, sehingga akan meningkatkan kemampuan dalam kemandirian daerah serta mengantisipasi apabila terjadi penurunan dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat.
2. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Bogor merumuskan strategi dalam penggunaan anggaran belanjanya dengan tepat, baik serta menghitung secara cermat besaran biaya yang akan dikeluarkan serta memprioritaskan belanja yang sangat dibutuhkan. Sehingga akan menimbulkan efisien dalam penggunaan dana belanja.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu menganalisis di periode selanjutnya agar berguna dalam melihat kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor sebelum pandemi covid-19, saat terjadi pandemi covid-19 serta pasca pandemi covid-19 sehingga akan terlihat dengan jelas perubahan pada kinerja keuangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andayani, Wuryan. (2007) *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Basuki, (2008). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Nordiawan Dedi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Erlina, O.S. Rambe, dan Rasdianto. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah: Berbasis Akrual*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mahmudi, (2010). *Manajemen Kerja Sektor Publik edisi revisi*. Yogyakarta: UPP
- Mardiasmo, (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Umar, Husein. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Yani, Ahmad. (2013). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers

Halaman Persetujuan Artikel dari Dosen Pembimbing

Artikel saya berjudul

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015-2020

Telah selesai dikoreksi dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dipublikasikan.

Tanda Tangan Tanggal

Mahasiswa : Arif alfajar



Dosen Pembimbing : Dr. Ali Masjono, S.E., M.B.I.T.

08/08/2022

